

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan teknologi informasi dan juga pemanfaatannya yang terus meningkat dari waktu ke waktu, kecepatan dan keakuratan informasi akan menjadi tuntutan dalam menjalankan roda perekonomian baik oleh pelaku bisnisnya sendiri maupun oleh masyarakat dan juga pemerintah. (Sithotang, 2015). Teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir semua organisasi maupun perusahaan karena dapat membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap proses bisnis mereka. (Octaria, 2016).

Teknologi Informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata- kata, bilangan, dan gambar. (Pautina, 2017). Teknologi informasi tersebut dapat dilakukan evaluasi agar menjadi lebih baik. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. (Puwarto, 2002)

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan Good Governance. Implementasi Good Governance akan menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi lain, penggunaan TIK oleh institusi pemerintahan sudah dilakukan sejak beberapa

dekade lalu, dengan intensitas yang semakin meningkat. Untuk memastikan penggunaan TIK tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko terkait dengannya, diperlukan Good Governance terkait dengan TIK, yang dalam dokumen ini disebut sebagai Tata Kelola TIK. (Nuh, 2007).

Tata kelola merupakan salah satu bagian terpenting dari kesukaan penerapan good corporate governance. Tata kelola memastikan pengukuran efektifitas dan efisiensi peningkatan proses bisnis perusahaan melalui struktur yang terkait dengan TI menuju ke arah tujuan strategis perusahaan. (Gondodiyoto, 2007). Pada Tata Kelola dapat dilakukan dengan menggunakan COBIT, COBIT merupakan IT governance best practice yang membantu auditor, manajemen, penggunaan (user) untuk menjembatani aspek bisnis, kebutuhan kontrol dan aspek teknis TI. (Gondodiyoto, 2007)

Dalam penerapan teknologi informasinya terdapat salah satu badan pemerintahan di Kota Surabaya yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah merupakan Badan yang mempunyai fungsi sebagai PPKD dan sebagai PD. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, fungsi sebagai PPKD adalah menjalankan fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan APBD dan Perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melaksanakan fungsi BUD, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan sebagai PD

maka tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dijelaskan pada Perwali Nomor 70 Tahun 2016. (Rencana Strategis BPKPD, 2016-2021).

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pajak daerah terdapat beberapa bidang didalamnya yaitu bidang anggaran, bidang perbendaharaan dan akuntansi, bidang pendataan dan penetapan pajak daerah, dan bidang penagihan dan pengurangan pajak daerah. Pada masing-masing bidang tersebut sudah menggunakan dan mengimplemetasikan teknologi informasi dengan baik, akan tetapi terdapat salah satu bidang yaitu di bidang penagihan dan pengurangan pajak daerah yang memiliki beberapa masalah tentang tata kelola teknologi informasi, sehingga menghambat proses bisnis dan kurang optimal.

Berdasarkan observasi dan wawancara pada lampiran 2 yang sudah dilakukan kepada bidang penagihan dan pengurangan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya dokumen standar operasional prosedur secara tertulis, sehingga staff – staff yang bekerja berdasarkan lisan. Hal itu membuat proses bisnis tidak efisien dan efektif.
2. Keterbatasan SDM pada staff IT nya. Sehingga salah satu staff bisa mengelola atau bertanggung jawab lebih dari satu tugas pokok. Hal itu membuat staff IT tersebut kewalahan dalam pekerjaanya dan berakibat tidak adanya dokumen SOP secara tertulis.
3. Sering terjadi server mengalami down karena jumlah traffic yang over, sehingga proses bisnis terhenti.
4. Ada sistem yang belum terintegrasi, sehingga proses bisnis tidak efisien dan efektif.

Berdasarkan permasalahan diatas dibutuhkan penelitian tentang Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi di bidang Penagihan dan Pengurangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, dikarenakan mengevaluasi tata kelola teknologi informasi tersebut dapat diharapkan memperbaiki dan mengelola TI yang diinginkan oleh bidang Penagihan dan Pengurangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sudah mencapai proses bisnis yang sesuai. Salah satu framework yang dapat memperbaiki tata kelola teknologi informasi di bidang Penagihan dan Pengurangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya adalah Framework COBIT 4.1. Penggunaan Framework COBIT 4.1 dinilai paling tepat karena pada kerangka kerja COBIT 4.1 tersebut mencakup area yang lebih luas dan lebih cocok digunakan untuk menilai dan mengevaluasi sebuah tata kelola teknologi informasi. Dan sudah dapat memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan pada tata kelola teknologi informasi lalu memiliki domain - domain yang mencakup tentang permasalahan – permasalahan yang muncul di bidang Penagihan dan Pengurangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Jika menggunakan COBIT 5 dirasa belum cukup karena, di bidang Penagihan dan Pengurangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya belum pernah melakukan proses evaluasi menggunakan COBIT, maka dari itu lebih baik menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan framework lainnya seperti Information Technology Infrastructure Library (ITIL) juga kurang cocok karena fokus pada ITIL adalah untuk pelayanan customer, dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap

strategi TI yang dikembangkan. Sedangkan jika menggunakan framework ISO/IEC 27002 juga kurang cocok karena hanya fokus untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan keamanan informasi.

Pada kerangka kerja Cobit 4.1 dengan melakukan pemetaan permasalahan pada masing – masing domain agar memperoleh sub domain yang sesuai. Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang sesuai dengan kerangka kerja COBIT 4.1 di bidang penagihan dan pengurangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah menggunakan domain Plan Organize (PO), Acquire and Implement (AI), dan Deliver dan Support (DS).

Lalu hasil dari evaluasi tata kelola tersebut pada Cobit 4.1, menyediakan suatu model pengukuran yaitu model kematangan (maturity level) yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi di bidang penagihan dan pengurangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya tingkatan berapa. Dan memberikan rekomendasi perbaikan kedepan sehingga tata kelola teknologi informasi di bidang penagihan dan pengurangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya menjadi lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang didapatkan antara lain :

1. Bagaimana kondisi tata kelola penggunaan teknologi informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya?
2. Bagaimana hasil evaluasi dari mengukur tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan rekomendasi yang tepat pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya menggunakan kerangka kerja Cobit 4.1?

1.3 Batasan Masalah

Berikut ini beberapa batasan masalah dari penelitian :

1. Berdasarkan hasil wawancara pada lampiran 1 semua bidang, bidang yang terdapat permasalahan hanya di bidang Penagihan dan Pengurangan. Maka dari itu penelitian ini hanya berfokus pada bidang Penagihan dan Pengurangan BPKPD Kota Surabaya.
2. Pengukuran tingkat kematangan (maturity level) tata kelola teknologi informasi pada BPKPD Kota Surabaya hanya fokus pada domain PO, AI dan DS yang berdasarkan hasil pemetaan dari kerangka kerja Cobit 4.1.
3. Pada penelitian ini dibatasi oleh studi kasus tidak membahas tentang anggaran biaya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kondisi tata kelola penggunaan teknologi informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
2. Mengetahui hasil evaluasi dari mengukur tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan rekomendasi yang tepat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya menggunakan kerangka kerja Cobit 4.1.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu - ilmu pengetahuan yang telah didapat dan bisa diimplementasikan khususnya di bidang analisis. Dan penulis dapat membandingkan dan menerapkan konsep analisis yang telah didapatkan selama perkuliahan dengan melakukan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah. Lalu penulis juga berharap penelitian ini berguna untuk dijadikan referensi jika ada yang membutuhkan.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah untuk mengetahui tingkat kematangan pada tata kelola teknologi informasi agar hasil evaluasi tata kelola tersebut dapat digunakan pada perbaikan tata kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah COBIT memiliki struktur yang lebih baik dalam hal mengalamatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan IT Auditing, dalam hal IT Auditing pada COBIT mencakup area yang lebih luas dan lebih cocok digunakan untuk menilai dan mengevaluasi sebuah IT Governance.